

Model Sistem Informasi Pengelolaan Retribusi Parkir Pada UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin

Norfitriyanti¹, Syahib Natarsyah^{2*}

^{1,2}Program Studi Sistem Informasi, STMIK Banjarbaru, Banjarbaru

^{1,2}Jl. A. Yani Km. 33,3 Banjarbaru, Kalimantan Selatan

**Corresponding Author:* syahib.stmik@gmail.com

Abstrak

Kegiatan pengolahan transaksi dalam mengelola data retribusi dan pajak parkir yang ada di UPTD perpajakan Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin belum berjalan dengan baik karena diolah secara manual, karena terdapat permasalahan: pertama, seringkali terjadi kesalahan perhitungan penetapan retribusi dan pajak parkir, demikian pula pembuatan laporan rekapitulasi penerimaan parkir salah ketik; kedua, untuk menemukan kembali dokumen tanda bukti setoran penerimaan retribusi dan pajak parkir yang bermasalah tidak dapat segera diketemukan. Jika hal ini tidak diatasi dapat mengakibatkan terjadi kehilangan data dan sulitnya melakukan kontrol terhadap penerimaan pendapatan daerah dari perpajakan sehingga dapat menjadi celah kecurangan dalam pengelolaan data perpajakan. Tujuan dari penelitian ini adalah membangun sistem informasi (*software*) berbasis desktop dalam pengelolaan retribusi dan pajak parkir yang dapat mempermudah UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin dalam melakukan transaksi perhitungan penerimaan retribusi dan pajak parkir dan sekaligus dapat mempermudah pembuatan laporan retribusi dan pajak parkir di Kota Banjarmasin.

Kata kunci: *Model Sistem Informasi, Retribusi Parkir, Dinas Perhubungan Kota*

Abstract

Transaction processing activities in managing data on parking fees and taxes in the UPTD parking area of the Department of Transportation of the City of Banjarmasin have not gone well because they are processed manually, because there are problems: first, there are often errors in calculation of the determination of fees and parking taxes, as well as making revenue recapitulation reports parking typo; secondly, to find the document of proof of payment of retribution receipt and problematic parking tax cannot be immediately found. If this is not resolved, it can result in data loss and the difficulty of controlling regional revenue from parking so that it can become a loophole in the management of parking data. The purpose of this study is to build a desktop-based information system (software) in the management of fees and parking taxes that can facilitate the UPT Parking of the Banjarmasin City Transportation Office in carrying out the calculation of receipts and parking tax revenues and at the same time can facilitate the making of retribution and parking tax reports in Banjarmasin City .

Keywords: *Information Systems Model, Parking Levy, City Transportation Agency*

1. Pendahuluan

Pelaksanaan otonomi daerah menganut prinsip bahwa sumber keuangan perolehan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih penting dibandingkan dengan sumber-sumber diluar PAD, karena PAD dikelola sendiri oleh pemerintahan daerah. Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada daerah dengan peraturannya sesuai dengan peraturan pemerintah R.I dan UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Salah satu contoh pos pajak daerah adalah dari Pajak parkir. Pajak parkir merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah pada pengelola tempat usaha seperti tempat-tempat hiburan, tempat makan khusus untuk meningkatkan kualitas pelayanan [1]. Sumber pendapatan dari daerah akan berperan sangat penting, sehingga pemerintah

daerah harus mampu mengolah dan menilai sumber-sumber daya dalam pendapatan daerah sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat yang ada didaerah tersebut [2]

Dinas perhubungan kota Banjarmasin adalah bagian dari Instansi Pemerintahan Kota (PEMKO) yang memiliki kantor UPT Parkir yang tugas pokoknya adalah mengelola perpajakan di wilayah kota Banjarmasin, baik yang berkaitan dengan lokasi parkir, pemilik parkir maupun kolektor parkir. Pengelolaan perpajakan sangat penting karena hasil dari retribusi parkir maupun pajak parkir merupakan bagian dari APBD Kota Banjarmasin yang kontribusinya pada PAD (Pendapatan Asli Daerah) 2018 ditargetkan mencapai Rp. 5,5 miliar dan Rp.35 juta [3].

Dalam pengelolaan administrasi retribusi dan pajak perpajakan pada UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin masih terdapat permasalahan: pertama, seringnya terjadi kesalahan perhitungan penetapan retribusi dan pajak parkir, hal ini terlihat pada tanda bukti penerimaan setoran retribusi dan pajak parkir yang diberi koreksi berupa catatan (salah perhitungan), demikian pula dalam pembuatan laporan rekapitulasi penerimaan parkir bulanan yang pada daftar tersebut diberi tanda koreksi berupa stamper dan diberi catatan bahwa nomor-nomor tertentu dalam daftar ini adalah salah ketik; kedua, untuk menemukan kembali dokumen tanda bukti setoran penerimaan retribusi dan pajak parkir yang bermasalah harus dilakukan dengan cara memilih satu persatu dari tumpukan arsip dan buku-buku catatan penerimaan lainnya yang tersedia. Permasalahan ini dapat mengakibatkan terjadi kehilangan data dan sulitnya melakukan control terhadap penerimaan pendapatan daerah dari perpajakan sehingga dapat menjadi celah kecurangan dalam pengelolaan data perpajakan, kurang efisien dari segi waktu dalam penyusunan laporan karena data setoran retribusi tidak langsung direkap, kegiatan pengolahan transaksi dalam mengelola data retribusi dan pajak parkir yang ada di UPTD perpajakan Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin belum berjalan dengan baik karena diolah secara manual.

Paper ini menyajikan sistem informasi (*software*) berbasis *desktop* dalam pengelolaan retribusi dan pajak parkir yang dapat mempermudah UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin dalam melakukan transaksi perhitungan penetapan setoran penerimaan retribusi dan pajak parkir dan sekaligus dapat mempermudah pembuatan laporan retribusi dan pajak parkir di Kota Banjarmasin.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian Rakasiwih dkk, dengan judul Sistem Informasi Peramalan Pendapatan Retribusi Parkir Dinas Perhubungan Kota Palembang tentang peramalan pendapatan retribusi parkir ini yaitu untuk membantu UPTD perpajakan Dinas Perhubungan kota Palembang untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya. Sistem yang dibangun dapat membantu dalam mengelola perizinan parkir, mengelola transaksi retribusi parkir dan dapat melakukan peramalan pendapatan retribusi parkir pada tahun selanjutnya. Data retribusi parkir akan dijadikan titik awal dalam peramalan pendapatan pada tahun berikutnya. Statistika akan dilakukan untuk menganalisa peramalan pendapatan retribusi dengan melakukan analisa menggunakan data berkala dengan metode kuadrat terkecil. Tidak akan terjadi redundansi kegiatan saat pengelolaan retribusi parkir dibantu dengan sebuah system, mengetahui lokasi mana yang belum membayar retribusi parkir, serta dapat meramalkan pendapatan retribusi parkir selanjutnya [4]

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh wahyudianto dengan judul "Perancangan Sistem Informasi Parkir Pada Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pacitan", yang membahas tentang sasaran pembangunan daerah kabupaten Pacitan melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, diarahkan kepada upaya dalam penyelenggaraan pelayanan yaitu jasa transportasi, komunikasi dan informatika sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang demokratis dan sejahtera. Tujuan dari penelitian ini adalah merancang sistem yang dapat digunakan untuk mengelola data parkir yang ada di Dinas Perhubungan dan Informatika pada kabupaten Pacitan. Hasil penelitian yaitu membuat rancangan system yang dapat mempermudah informasi pada pihak Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika kabupaten Pacitan dalam mengetahui data yang ada misalnya data transaksi [5].

Penelitian yang dilakukan oleh Cahya Vikasari tentang sistem retribusi parkir ini adalah membangun sistem dalam mengelola retribusi parkir yang dapat membantu Dinas Perhubungan dalam melakukan pengawasan terhadap penerimaan retribusi parkir di kabupaten Cilacap.

Sistem aplikasi retribusi parkir ini menghasilkan laporan yang akan memberikan informasi perkembangan dari penerimaan pendapatan asli daerah khususnya retribusi parkir dan akan menjadi informasi yang berharga bagi kepala Dinas Perhubungan untuk membuat kebijakan sesuai dengan informasi yang didapatkan dari laporan yang ada. Fungsi pengawasan dan kontrol terhadap proses retribusi parkir juga secara tidak langsung merupakan nilai tambah dari aplikasi ini karena perubahan data pada aplikasi memperlihatkan bahwa pegawai yang mengelola data retribusi parkir telah menjalankan tugasnya [2]

Penelitian Siti Nur Zaroah yang berjudul Sistem Informasi Pengelolaan Tenaga Parkir Dan Retribusi Parkir Pada Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kudus, menghasilkan aplikasi perangkat lunak untuk memudahkan proses pengolahan dan pencarian data agar lebih cepat sebelum dibangun aplikasi, disamping itu untuk memudahkan dalam mengelola laporan pendapatan parkir. Hasil dari rancang bangun ini adalah sebuah aplikasi berbasis desktop [6]

Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan, maka perbedaan yang mendasar pada penelitian ini adalah pada sasaran pokoknya yaitu sistem pada proses perhitungan penetapan retribusi/pajak parkir terhadap pelaksana parkir dan proses pembuatan rekapitulasi laporan yang lebih cepat dan akurat karena data setoran retribusi/pajak langsung diproses oleh sistem dan tersimpan dalam database secara otomatis.

2.1. Landasar Teori

2.2.1 Sistem Informasi

Pengertian Sistem Informasi menurut Kadir [7] dengan mengutip dari mengutip dari beberapa pendapat para ahli, diantaranya adalah: Menurut Hall sistem Informasi adalah "Sebuah rangkaian prosedur formal di mana data dikelompokkan, diproses menjadi informasi dan didistribusikan kepada pemakai". Menurut Bodnar dan Hopwood sistem Informasi adalah "Kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mentransformasikan data kedalam bentuk informasi yang berguna". Sehingga secara umum sistem informasi dapat diartikan sebagai suatu sistem terintegrasi yang mampu menyediakan informasi yang bermanfaat bagi penggunaannya.

Sistem informasi menurut Athoillah dan Irawan [8] terdiri dari beberapa komponen yang disebut blok bangunan (building block), terdiri dari komponen input, komponen model, komponen output, komponen teknologi, komponen *hardware*, komponen *software*, komponen basis data, dan komponen kontrol. Dimana semua komponen tersebut saling berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem informasi itu sendiri dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu diperlukan sebuah perencanaan, pelaksanaan, pengaturan, dan evaluasi untuk dapat menerapkan sistem informasi secara efektif dan efisien, sedangkan menurut Jogiyanto [9] Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya.

2.2.1. Sistem Parkir

Dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Bab I Ketentuan Umum, pada Pasal 1 angka 15 dan 16 tertulis sebagai berikut : *Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 15. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya; 16. Berhenti adalah keadaan Kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.* Menurut Martadipura 2013 dalam Arief Budiman & Joko Triono (2016), terdapat dua jenis yaitu Parkir yang berada di badan jalan (*on street parking*) dan parkir yang berada luar badan jalan (*off street parking*). Pada *On Street parking* membutuhkan badan jalan untuk digunakan sebagai tempat parkir, contoh adalah parkir di depan pertokoan dimana kendaraan berhenti di pinggir jalan. Sedangkan untuk *off street parking* tidak membutuhkan badan jalan untuk sebagai tempat parkir melainkan dipersiapkan sebuah lahan khusus untuk menampung kendaraan parkir [10]. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa parkir, suatu keadaan dimana suatu kendaraan yang bersifat sementara ditinggalkan oleh pengemudinya.

2.2.2. Retribusi Parkir

Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan daerah Kota Banjarmasin nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

dan Tempat Parkir Khusus pada pasal 3 ayat 1, 2 dan 3 : menyebutkan bahwa (1) Objek Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan; bahwa (2), Objek Retribusi khusus tempat parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang telah disediakan, dimiliki dan/atau dikelola pemerintah Daerah; bahwa (3) Dikecualikan dari Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan /atau dikelola oleh pemerintahan, BUMN, BUMD dan pihak swasta. Selanjutnya tarif retribusi parkir diatur pada pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa besarnya tariff retribusi parkir di tepi jalan umum untuk satu kali parkir ditetapkan (a) Kendaraan tempelan/gandingan Rp.10.000 / perkendaraan; (b) Kendaraan truck ukuran berat Rp. 8.000 /kendaraan; (c) Kendaraan truck mini dan sejenisnya Rp. 4.000 / kendaraan; (d) Kendaraan mobil sedan, mini bus, pick up dan kendaraan lainnya sejenisnya Rp. 3.000 / kendaraan; (e) Kendaraan Bajaj, Kaisar, Tossa, roda tiga dan sejenisnya Rp. 2.000.- perkendaraan; (f) Kendaraan bermotor jenis sepeda motor Rp.2.000 / kendaraan. Kemudian pasal 14 ayat (1) Pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh petugas Dinas Perhubungan yang secara teknis dilaksanakan oleh UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah). Ia berdasarkan potensi parkir masing-masing titik parkir [11]

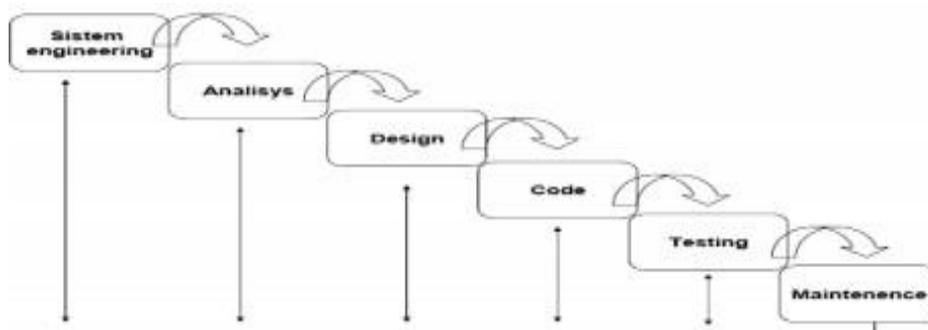
2.2.3. Pajak Parkir

Menurut Siahaan (2013) mengatakan Pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan [12]

Dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Ketentuan Pajak parkir di Kota Banjarmasin ditentukan berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2011, pada pasal 3 ayat (1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Pasal 7 menyatakan bahwa Tarif pajak parkir ditetapkan 30 % (Tiga puluh persen) dari dasar pengenaan pajak [13]

3. Metodologi

Pengembangan perangkat lunak yang dilakukan dalam membangun sistem informasi pengelolaan retribusi parkir pada UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin menggunakan metode *waterfall*. Metode *waterfall* (gambar 1) ini merupakan metode yang menggunakan pendekatan alur hidup sebuah perangkat lunak secara sekuensial atau secara berurut mulai dari tahap analisis, tahap desain, tahap pengkodean, tahap pengujian, tahap support [14].



Gambar 1. Metode Waterfall [14]

3.1 System Engineering

Pada tahap pertama, dilakukan studi mengenai penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan berkaitan dengan implementasi sistem informasi perpajakan atau lainnya yang memanfaatkan teknologi informasi dan mempelajari permasalahan-permasalahan yang terjadi berkaitan dengan pengelolaan retribusi dan pajak parkir yang dilakukan oleh UPT Parkir di Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin.

3.2 Analisis

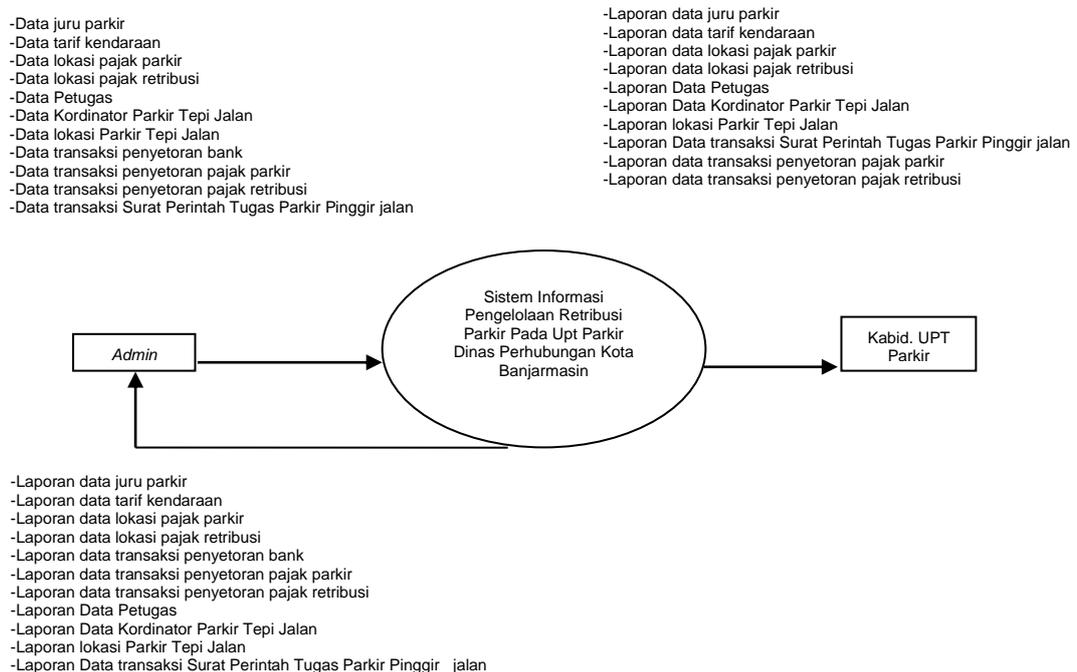
Pada tahap selanjutnya dilakukan analisis terhadap temuan permasalahan-permasalahan yang terjadi berkaitan dengan pengelolaan perpajakan di UPTD Pakir Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, hasil dari analisis ini terangkum dalam sub bagian Identifikasi masalah, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Output dari hasil analisis yaitu diperlukan sebuah aplikasi yang dapat mempermudah proses perhitungan retribusi dan pajak parkir yang dibebankan pada objek retribusi dan pajak parkir sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu PERDA Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pajak Parkir [11] dan peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 19 Tahun 2020 tentang Izin Pengelolaan Parkir [15]

3.3 Design

Pada tahap ini adalah menterjemahkan hasil analisis kedalam bentuk desain aplikasi dan infrastruktur yang dapat mendukung jalannya aplikasi. Langkah dari tahap ini adalah “

(1) Pembuatan Diagram Konteks

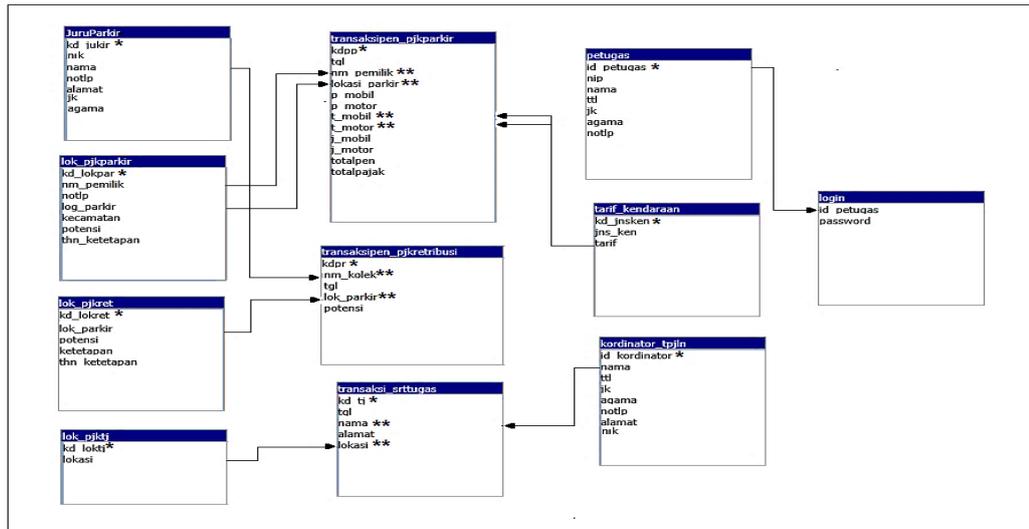
Diagram Konteks adalah gambaran umum mengenai sistem prosedur yang terjadi antara sistem dan penggunanya. Diagram konteks dari sistem ini ditunjukkan pada gambar 2 sebagai berikut:



Gambar 2. Diagram Konteks

(2) Diagram Database

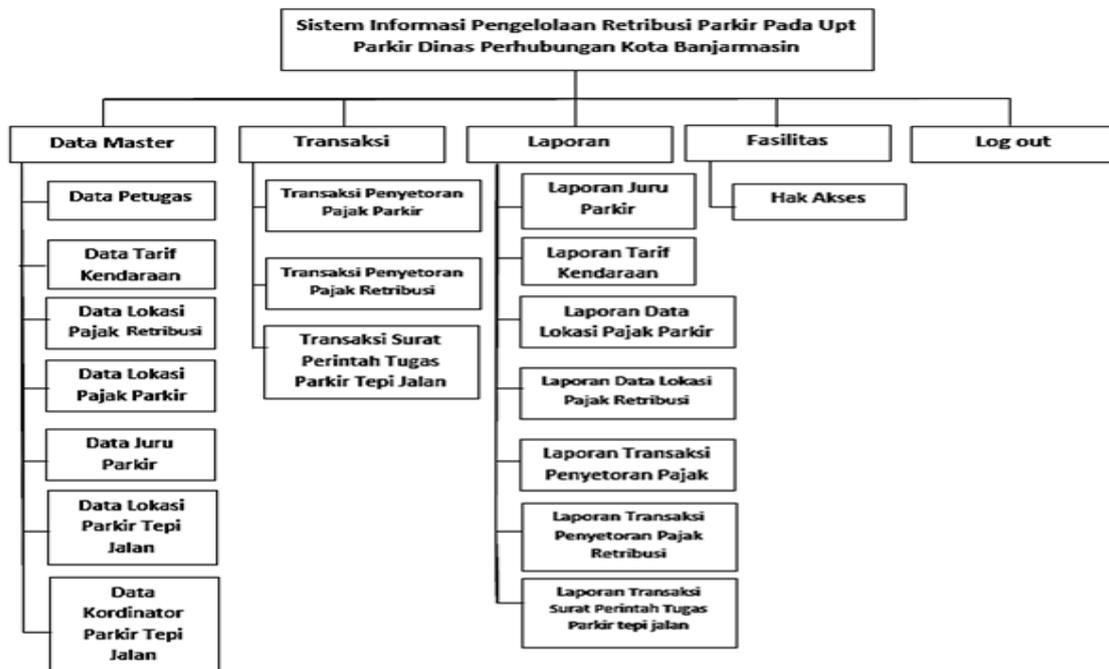
Relasi Tabel adalah hubungan antara suatu tabel dengan tabel lainnya. Berikut ini relasi tabel pada *database* Sistem Informasi Pengelolaan Retribusi Parkir Pada UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin.



Gambar 4. Relasi Tabel

(3) Desain Arsitektural

Berikutnya adalah Desain Arsitektural yang merupakan desain struktur hirarki pada menu utama setiap aplikasi yang menggunakan user interface. Desain arsitektural pada menu utama Sistem Informasi Pengelolaan Retribusi Parkir Pada UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin dapat dilihat pada gambar 5 berikut ini :



Gambar 5 Desain Arsitektur Sistem Aplikasi

3.4 Code

Setelah tahap desain selesai dilaksanakan untuk selanjutnya adalah menterjemahkan desaintersebutkedalambahasapemrograman.

3.5 Testing

Selanjutnya dari hasil penyusunan code program kemudia dilakukan pengujian dari program yang telah dikembangkan. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menemukan kesalahan- kesalahan program yang mungkin terjadi.

3.6 Maintenance

Setelah penyusunan program selesai dan dilakukan implementasi aplikasi, maka perlu dilakukan tahapan *maintenance* atau perawatan sistem. Dimana mungkin akan terjadi kesalahan-kesalahan implementasi lebih lanjut atau diperlukan penambahan-penambahan fitur aplikasi. Akan tetapi pada penelitian ini hanya dilakukan sampai pada tahap implementasi dan belum sampai pada tahap *maintenance*.

4. Hasil & Pembahasan

4.1. Hasil Penelitian

Setelah tahap penyusunan code dan testing selesai dilakukan maka tahap selanjutnya adalah implementasi dari aplikasi yang dikembangkan. Pada saat aplikasi pertama kali dijalankan oleh petugas parkir melalui aplikasi yang terinstall pada perangkat komputer berbasis *desktop* akan ditampilkan beberapa tampilan seperti yang terlihat pada gambar berikut.

(1). Form Transaksi Penyetoran Pajak Parkir

Form transaksi penyetoran pajak parkir ini terlebih dahulu melalui halaman menu utama, lalu memilih menu transaksi dan selanjutnya ke form transaksi penyetoran pajak parkir, halaman ini digunakan untuk memasukan data transaksi penyetoran pajak parkir. Untuk melakukan proses pengelolaan data pada form transasksi penyetoran pajak parkir ada beberapa tombol yang disediakan yaitu tombol tambahkan data, simpan, ubah, dan hapus. Pada transaksi penyetoran pajak parkir memiliki beberapa tombol bantu, yang mana langsung mengambil data dari data master sehingga inputan tertulis secara otomatis untuk mecegah terjadinya kesalahan dalam penulisan serta mempercepat dalam mengeksekusi setiap transaksi. Transaksi penyetoran pajak parkir terdiri dari 2 form, form pertama digunakan untuk menampilkan daftar transaksi secara keseluruhan, dan form kedua berisi data inputan serta perhitungan. Berikut ini adalah tampilan form transaksi penyetoran pajak parkir:

NO. JP1B	Value
NO. JP1B	AB-0006
Tanggal	25/09/2019
Kepada	
Lokasi Parkir	
R4	
R2	

R4		
UNIT	TARIF	JUMLAH
0	x 0	= 0

R2		
UNIT	TARIF	JUMLAH
0	x 0	= 0

Total Pendapatan = 0

Jumlah Pajak = 0

Gambar 6 Form Transaksi Penyetoran Pajak Parkir

(2). Form Transaksi Penyetoran Pajak Retribusi

Form transaksi penyetoran pajak retribusi pada gambar 7 terlebih dahulu melalui halaman menu utama, lalu memilih menu transaksi dan selanjutnya ke form transaksi penyetoran pajak retribusi, halaman ini digunakan untuk memasukan data transaksi penyetoran pajak retribusi. Untuk melakukan proses pengelolaan data pada form transasksi penyetoran pajak retribusi ada beberapa tombol yang disediakan yaitu tombol tambahkan data, simpan, ubah, dan hapus. Pada transaksi penyetoran pajak retribusi memiliki beberapa tombol bantu, yang mana langsung mengambil data dari data master dan mengambil data yang telah tersimpan di master data sehingga inputan tertulis secara otomatis untuk mecegah terjadinya

kesalahan dalam penulisan serta mempercepat dalam mengeksekusi setiap transaksi. Transaksi penyetoran pajak retribusi terdiri dari 2 form, form pertama digunakan untuk menampilkan daftar transaksi secara keseluruhan, dan form kedua berisi data inputan. Berikut ini adalah tampilan form transaksi penyetoran pajak retribusi:

kdpr	nis_kolek	tgl	skl_parkir	potensi
AA-0001	vghrhgv	21-Sep-19	ddd	2222
AA-0002	vghrhgv	20-Sep-19	ddd	2222
AA-0003	vghrhgv	20-Sep-19	ddd	2222
AA-0004	vghrhgv	20-Sep-19	ddd	2222
AA-0005	vghrhgv	20-Sep-19	ddd	2222
AA-0006	vghrhgv	20-Sep-19	ddd	2222

Gambar 7. Form Daftar Transaksi Penyetoran Pajak Retribusi

(3) Form Laporan Transaksi Penyetoran Pajak Parkir

Form laporan Transaksi penyetoran pajak parkir gambar 8 pertama akan tampil form filter yang mana dapat ditampilkan laporan penyetoran pajak parkir berdasarkan tanggal yang bisa diatur secara periode yang diinginkan. Berikut ini adalah tampilan form laporan penyetoran pajak parkir. Laporan transaksi penyetoran pajak tersebut dapat dicetak dengan hasil cetakan terlihat pada gambar sebagai berikut:

Gambar 8. Form Laporan Transaksi Penyetoran Pajak Parkir

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KANTOR UPT. PARKIR KOTA BANJARMASIN

LAPORAN TRANSAKSI PENYETORAN PAJAK PARKIR

Banjarmasin, 25 September 2019

Kd.Transaksi	Tanggal	Nama Pemilik	Lokasi Parkir	Unit R4	Tarif R4	Jumlah R4	Unit R2	Tarif R2
AB-0001	23-Sep-19	od asadcsoc	foadofc	1	3000	3000	1	2000
AB-0002	24-Sep-19	od asadcsoc	foadofc	2	3000	6000	2	2000
AB-0003	24-Sep-19	od asadcsoc	foadofc	3	3000	9000	3	2000
AB-0004	24-Sep-19	wvvdv	vydvdy	1	3000	3000	2	2000
AB-0005	24-Sep-19	od asadcsoc	foadofc	2	3000	6000	1	2000

23-Sep-19 S/D 24-Sep-19

Gambar 9 Tampilan Laporan Transaksi Penysetoran Pajak Parkir

(4) Form Laporan Transaksi Penysetoran Pajak Retribusi

Form laporan transaksi penysetoran pajak retribusi pertama akan tampil form filter yang mana dapat ditampilkan laporan transaksi penysetoran pajak retribusi berdasarkan tanggal yang bisa diatur secara periode yang diinginkan. Berikut ini adalah tampilan form laporan transaksi penysetoran pajak retribusi:

LAP. TRANSAKSI PAJAK RETRIBUSI

CETAK LAPORAN BERDASARKAN TANGGAL :

Dari Tanggal : 25/09/2019

Sampai Tanggal : 25/09/2019

Cetak

CETAK LAPORAN KESELURUHAN :

CETAK

Keluar

Gambar 10 Form Laporan Transaksi Penysetoran Pajak Retribusi

Kemudian laporan transaksi penyetoran pajak retribusi juga dapat dicetak dengan hasil cetakan terlihat pada gambar sebagai berikut:

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KANTOR UPT. PARKIR KOTA BANJARMASIN

Banjarmasin, 25 September 2019

LAPORAN TRANSAKSI PAJAK RETRIBUSI

KDPR	NAMA KOLEKTOR	TANGGAL	LOKASI PARKIR	POTENSI
AA-0001	hghthgr	21-Sep-19	ddd	2222
AA-0002	hghthgr	20-Sep-19	ddd	2222
AA-0003	hghthgr	20-Sep-19	ddd	2222
AA-0004	hghthgr	20-Sep-19	ddd	2222
AA-0005	hghthgr	20-Sep-19	ddd	2222
AA-0006	hghthgr	20-Sep-19	ddd	2222

20-Sep-19 S/D 21-Sep-19

Gambar 13 Tampilan Laporan Transaksi Penyetoran Pajak Retribusi

4.2 Pembahasan

Model Sistem Informasi ini telah diujicobakan di UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin. Selanjutnya dilakukan *User acceptance* secara langsung oleh pegawai/petugas Kantor UPTD, melalui kuisisioner yang disampaikan berkaitan dengan kemanfaatan dari Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Retribusi Parkir yang telah dibangun ini. Hasil Pengujian *user acceptance* ini dijadikan dasar untuk menilai apakah Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Retribusi Parkir pada Upt. Parkir Dinas Perhubungan yang telah dibangun ini dapat digunakan dan mempermudah, mempercepat berbagai pekerjaan pada instansi ini dapat berfungsi secara efektif dan efisien dengan tingkat akurasi yang tinggi. Pengujian *user acceptance* ini menggunakan kuisisioner yang diberikan kepada 6 responden dengan jawaban tertutup berdasarkan model skala 4. Pilihan jawaban yaitu: Skor 1: Tidak Setuju (TS); Skor 2 Kurang Setuju (KS); Skor 3 : Setuju (S) dan Skor 4: Sangat Setuju (SS). Untuk memberikan penilaian hasil *user acceptance* dari semua responden yang telah mengisi kuisisioner ditentukan dengan kriteria penilaian pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Kriteria Penilaian Hasil User Acceptance

Kategori	Nilai Interval Rerata	Kriteria
1	1,00 - < 1,74	Tidak Puas
2	1,75 - < 2,50	Kurang Puas
3	2,50 - < 3,25	Puas
4	3,25 - ≤ 4,00	Sangat Puas

Berdasarkan hasil pengukuran skor rerata dari semua responden pada tabel 2 di atas, menunjukkan angka **3,76**. Skor rerata ini jika kita cocokkan dengan tabel 1(kriteria penilaian kepuasan), skor reratanya berada pada kategori ke-empat (3,25 - ≤ 4,00). Jadi dapat disimpulkan bahwa responden memberi jawaban sangat puas terhadap aplikasi yang dibangun tersebut. Sebelumnya juga dilakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap butir-butir pertanyaan kuisisioner yang diisi oleh responden. Hasil menunjukkan bahwa semua pertanyaan valid dan tingkat reliabilitas dengan *alfa crounbach* mencapai 0,92 terletak pada skala antara 0,80 dengan 1,00 dengan kategori sangat reliabel.

5. Kesimpulan

Model Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Retribusi Parkir Pada UPTD Parkir Dinas Perhubungan dapat mengatasi berbagai masalah yaitu (1) dapat mengatasi masalah kesalahan perhitungan penetapan retribusi dan pajak parkir, (2) pembuatan laporan rekapitulasi penerimaan parkir bulanan menjadi lebih cepat dan akurat, (3) data penerimaan retribusi dan pajak parkir secara otomatis tersimpan dalam database, (4) pelaporan hasil penerimaan retribusi dan pajak parkir dapat dibuat harian, bulanan atau pertahun sesuai dengan keperluan dengan cara memfilter laporan yang dikehendaki.(5) pengawasan terhadap pengelolaan retribusi dan pajak parkir lebih mudah dilakukan.

REFERENSI

- [1] Butarbutar T.E. Analisa Peranan Pajak Parkir Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Tomohon. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*. 2015; 2(4): 697-704
- [2] Vikasari C. Sistem Retribusi Parkir Sebagai Pengawasan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cilacap. *Jurnal Nasional Teknologi dan Sistem Informasi*. 2019; 5(1):1-8.
- [3] Subhan, <https://seruji.co.id/daerah/indonesia-timur/badan-keuangan-daerah/> Rabu, 4 Apr, 2018 | 11:02
- [4] Rakasiwih E. & Fitriansyah M.A., Sistem Informasi Peramalan Pendapatan Retribusi Parkir Dinas Perhubungan Kota Palembang, Repositori, *STIMIK GI MDP*, 2013; 1-7.
- [5] Wahyudianto E. Perancangan Sistem Informasi Parkir Pada Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pacitan. *InSeruni-Seminar Riset Unggulan Nasional Informatika dan Komputer*. 2013; 2(1): 19–26.
- [6] Zaroah S. N. *Sistem Informasi Pengelolaan Tenaga Parkir Dan Retribusi Parkir Pada Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kudus*. Skripsi, 2014: Universitas Muria Kudus.
- [7] Kadir, A. *Pengenaan Sistem Informasi*, Yogyakarta: ANDI Yogyakarta, 2013
- [8] Athoillah M., Irawan M.I. Perancangan sistem informasi mobile berbasis Android untuk kontrol persediaan barang di gudang. *Jurnal Sains dan Seni Pomits*. 2013; 1(1):1-6.
- [9] Jogiyanto H.M. *Analisis dan Desain Informasi*. Yogyakarta: Andi offset, 2005
- [10] Budiman, Arief., Dayanto, Tomy, Dwi., Lantik., *Pengembangan Aplikasi Mobile Pembelajaran Mitigasi Bencana Gempa Bumi Berbasis Multimedia*, Prosiding Sentika, 2012.
- [11] Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin nomor 8 Tahun 2011
- [12] Siahaan. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013
- [13] Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir
- [14] Budiman, A. Triono J. Sistem Informasi Parkir Kendaraan Bermotor berbasis android, *Pilar Teknologi, Jurnal Ilmiah-Ilmu Teknik*. 2016; 1(1): 42-49
- [15] Peraturan Walikota Banjarmasin No :19 Tahun 2020 tentang Izin Pengelolaan Parkir di Kota Banjarmasin